



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI  
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020-2021  
**Masa Persidangan** : V  
**Rapat ke** : -  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Dengan** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Kamis, 3 Juni 2021  
**Waktu** : 10.24 WIB s.d. 13.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung  
Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot  
Soebroto, PT 10270
- Acara** : 1. Pembahasan Pembicaraan  
Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan  
RKP Tahun 2022 (RKA K/L dan RKP  
K-L Tahun 2022);  
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA  
2020.  
3. Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan  
Anggaran Tahun 2021.
- Ketua Rapat** : Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (F-PDI  
Perjuangan)
- Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 38 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII  
DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**  
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)  
2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.  
(F-PDI Perjuangan)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

3. I Komang Koheri, SE.
4. Paryono, S.H., M.H.
5. Ina Ammania
6. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
7. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.

8. H. Rachmat Hidayat, S.H.
9. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
- FRAKSI PARTAI GOLKAR**
10. Mohammad Saleh, S.E.
11. Muhammad Ali Ridha.
12. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.
- FRAKSI PARTAI GERINDRA**
13. M. Husni, S.E., M.M.
14. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
- FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**
15. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMTr.
- FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
- 
- FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
- 
- FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
16. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
- FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
17. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.
- FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
18. KH. Muslich Zainal Abidin

- Anggota Izin** :
1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A.
  2. Selly Andriany Gantina, A.Md.
  3. Umar Bashor.
  4. H. Arwan M. Aras T., S.Kom.
  5. H. Maman Imanul Haq
- Undangan** :
- Menteri PPPA RI (I Gusti Ayu Bintang Darmawati)

## **JALANNYA RAPAT**

### **KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):**

Salam sejahtera untuk kita semua.

*Om Swastiastu.*

*Namo Buddhaya.*

Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajaran.

Para anggota Komisi VIII DPR RI dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Kerja hari ini pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII sebelum acara dilanjutkan marilah kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran acara hari ini Serta bagi yang beragama Islam membaca ummul Kitab dan bagi agama lain dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

### **PESERTA RAPAT BERDOA**

Terima kasih.

### **BERDOA SELESAI**

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi di DPR RI pada tanggal 8 April 2021 dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal tersebut, maka pada hari ini Kamis 3 Juni 2021 Komisi VIII melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP tahun 2022, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan anggaran tahun 2021.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada hari ini telah hadir secara fisik 15 anggota serta virtual 22 anggota dari 51 anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti rapat telah bisa diputuskan kuorum telah tercapai dan atas persetujuan Ibu Menteri serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII. Rapat ini kami buka dan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.24 WIB.)**

Acara rapat pada hari ini:

1. Pertama pengantar Ketua Rapat.

2. Kedua penjelasan menteri mengenai pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2022. Lalu yang kedua evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Yang ketiga evaluasi kinerja pelaksanaan APBN tahun 2021.
3. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab
4. Menyusun kesimpulan.
5. Lalu penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya Rapat ini akan berakhir kita putuskan dulu sampai pukul 11.30 ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saya hormati.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan jajarannya yang telah hadir memenuhi undangan rapat Komisi VIII DPR RI. Rapat ini mempunyai nilai strategis karena Rapat Kerja dan agenda pembahasan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022. Ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; bahwa salah satu ruang lingkup tugas komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan pemerintah.

Sebelum kami mempersilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan paparannya, kami ingin menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI selama ini sangat mendukung berbagai program dan anggaran yang diperlukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami masih perlu menyoroti beberapa hal yang terkait dengan anggaran di lingkungan KPPA yakni:

1. Pelaksanaan program non fisik pembangunan perlindungan dan anak di 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota dengan dana alokasi khusus (DAK) PPA) tahun 2021 yang disimulasikan sebesar Rp.101.747.000.000. rupiah ini belum seluruhnya disampaikan Bu.
2. Yang kedua peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada rencana kerja pemerintah tahun 2021 dengan memprioritaskan pada penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak serta penguatan

koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang terdampak Covid-19

3. Ketiga lima prioritas pembangunan bidang perempuan dan anak oleh KPPA senantiasa Komisi VIII DPR RI mendukung yakni:
  - a. Pertama meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
  - b. Kedua, meningkatkan peran ibu dan keluarga peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
  - c. Yang ketiga menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - d. Keempat menurunkan pekerja anak;
  - e. dan kelima mencegah perkawinan anak.

Atas dasar permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan di atas maka pada Rapat Kerja hari ini Komisi VIII ingin mendapatkan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertama berapa rancangan anggaran KPP Tahun 2022 dan dialokasikan untuk program prioritas apa saja?
2. Bagaimana dengan target yang hendak dicapai oleh KPPA Tahun 2022 dan apa saja yang sejauh ini sudah dikerjakan?
3. Ketiga Bagaimana laporan rinci mengenai penggunaan DAK PPA tahun 2021 dan serapan anggaran program kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020/

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilakan Ibu Menteri KPPPA untuk menyampaikan penjelasannya.

**MENTERI KPPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Yang terhormat Ketua Komisi VIII DPR RI demikian juga para Pimpinan Komisi VIII.

Yang saya hormati dan saya banggakan dan hormati dan saya banggakan; dan tentunya

Yang saya hormati dan saya banggakan anggota Komisi VIII DPR RI.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

*Assalamualaikum warahmatullahi.*

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

*Salom.*

*Om Swastiastu.*

*Namo buddhaya.*

Salam kebajikan.

Salam sehat untuk kita semua.

Pada pagi hari ini syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan sehingga pagi hari ini kita bisa masih bisa bersilaturahmi dengan Komisi VIII melalui Rapat Kerja yang kita lakukan pada hari ini.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan jajaran Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa penjelasan.

Yang pertama, yang berkaitan dengan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022. Demikian juga evaluasi pelaksanaan anggaran 2020 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang tadi. *Next.*

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang berbahagia.

Tema RKP Tahun 2022 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tentu ini melalui 8 fokus pembangunan demikian juga melalui 7 prioritas nasional mungkin tidak akan jelaskan lagi untuk mempersingkat waktu dan saya sangat yakin Bapak Ibu Komis VIII sudah paham. Untuk itu kami sampaikan berkaitan dengan isu prioritas nasional yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada pada prioritas nasional ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dimana indikator keberhasilannya adalah indeks pembangunan gender dan indeks perlindungan anak yang kemudian diturunkan ke dalam indikator program prioritas yaitu adalah program prioritas yang kelima adalah peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda. *Next.*

Sedangkan, Bapak Ibu yang kami hormati, arah kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan pada RKP tahun 2022 dan diprioritaskan pada perwujudan lingkungan ramah anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi politik dan ketenagakerjaan, memperkuat sistem layanan terpadu dengan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perkawinan anak dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Nah strategi Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 ini berfokus pada peningkatan perlindungan anak dan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan, demikian juga perlindungan hak perempuan. *Next.*

Bapak Ibu Pimpinan Sidang serta hadirin yang berbahagia.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 tetap mengarah pada pencapaian prioritas RPJMN 2020-2024 dalam bentuk rencana prioritas dengan terus mencermati dampak Covid-19 pada pelaksanaan prioritas pembangunan. Nah efisiensi dilakukan agar dapat memperluas ruang gerak prioritas dan terfokus pada proyek yang benar-benar siap yang akan dilaksanakan atau didanai.

Nah belanja yang kita ketahui bersama pada hampir seluruh kementerian/lembaga pada tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Tentunya efisiensi dan efektivitas APBN tahun 2022 dilakukan melalui restrukturisasi program, melalui koordinasi antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga. Ini kemudian ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Program Kementerian dan Lembaga Anggaran 2022.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Surat Bersama Bappenas dan Menteri Keuangan pertanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan Pagu Indikatif itu adalah sebesar Rp.252,69 miliar untuk tahun 2022. Nah jumlah ini kita lihat sebesar 26,87 miliar dibandingkan pada awal tahun 2021 itu adalah sebesar Rp279,56 miliar/ Demikian pula bila dibandingkan pagu anggaran setelah refocusing tahun 2021 sebesar 267 miliar maka pagu anggaran tahun 2022 turun hanya sebesar 14,3 miliar.

Namun jika dibandingkan Bapak Ibu yang kami hormati dengan pagu anggaran tahun 2021 karena di tahun 2021 ini kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan dua survei dan demikian juga setelah *refocussing* yaitu sebesar 237,6 miliar maka pada tahun 2022 bisa kita lihat berkaitan dengan pelaksanaan program itu adalah meningkat sebesar 15,7 miliar. Nah peningkatan ini karena pagu belanja operasional itu pegawai dan barang tahun anggaran 2022 meningkat 32,9% itu sebesar 29,4 miliar dari 89,4 tahun anggaran 2021 menjadi 118,9 miliar pada tahun anggaran 2022. Sedangkan pagu belanja non operasional tahun anggaran 2022 itu menurun 9,5% dari 148 miliar menjadi 133,8 miliar.

Adapun rincian Pagu Indikatif tahun 2022 adalah sebagai berikut pada program dukungan manajemen dan belanja operasional itu sebesar 118,87 miliar rupiah dan non operasional sebesar 34,38 miliar, sehingga total berjumlah 153,25 miliar rupiah. Sedangkan pada program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak dan belanja non-operasional itu adalah sebesar 99,43 miliar rupiah.

Dengan demikian belanja operasional sebesar 118,87 miliar rupiah, dan non-operasional sebesar 133,82 miliar. Jadi Pagu Indikatif tahun 2022 tersebut sudah termasuk belanja operasional pegawai sebesar 62,04 miliar dan belanja operasional barang sebesar 56,82 miliar rupiah dengan total sebesar 118,87 miliar rupiah.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun rancangan rencana kerja tahun 2022 dengan memperhatikan beberapa isu strategis, antara lain:

1. Yang pertama itu adalah Berdasarkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Tentunya indeks pembangunan manusia perempuan ini masih berstatus sedang sebesar 9,19 sedangkan IPM laki-laki sudah berstatus tinggi itu sebesar 75,98. Ini berarti kualitas sumber daya manusia perempuan lebih rendah dari laki-laki dan berkontribusi pada rendahnya nasional.
2. Demikian juga kesenjangan gender dalam pembangunan masih tinggi di mana indeks pembangunan gender atau IPG itu sebesar 91,07 tahun 2019 itu menurun 0,01 poin tahun 2020 itu menjadi 91,06.

3. Yang ketiga peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam politik dan ekonomi belum maksimal. Kita bisa lihat dari indeks pemberdayaan gender itu hanya sebesar 75,57 pada tahun 2020.
4. Yang keempat itu ada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah. Dimana pada tahun 2020 itu sebesar 53% dibandingkan laki-laki adalah 83%. Nah factor determinannya adalah status pernikahan, jumlah anak, demikian juga tingkat pendidikan.
5. Yang kelima itu adalah masih tingginya kekerasan terhadap perempuan. Nah tingginya kekerasan terhadap perempuan ini sudah sering kami laporkan/sampaikan pada Komisi VIII, ini baik data dari Komnas Perempuan demikian juga Simfoni PPPA, demikian juga data-data survei yang ada ini masih sangat tinggi kekerasan terhadap perempuan.
6. Demikian juga yang keenam itu belum optimalnya pemenuhan hak anak Indonesia. Nah Indeks Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019 itu adalah sebesar 66,26 masih jauh daripada target 100 poin.
7. Yang ketujuh itu masih tingginya kekerasan terhadap anak. Nah ini pun sudah sering kami laporkan kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat Komisi VIII dan ini kita bisa lihat juga dari data survei kemudian data dari KPAI dan termasuk data kami di Simfoni PPPA.
8. Yang kedelapan meningkatnya kekerasan berbasis gender secara online dan Perdagangan orang secara online. Nah di masa pandemic ini permasalahan yang cukup tajam terjadi. Nah kalau kita melihat data berikut Komnasas perempuan itu mencatat kenaikan pengadilan atas kekerasan online secara signifikan dari 241 kasus tahun 2019 ini menjadi 140 kasus tahun 2020.
9. Kemudian yang kesembilan meningkatnya anak-anak pada kelompok rentan yang ditandai dengan meningkatnya presentase anak bekerja. Nah ya Ini juga menjadi permasalahan.
10. Kemudian layanan pada perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal. Nah ini ketidakefektifan ini terus kami upayakan bagi korban kekerasan di mendapatkan perhatian yang tentunya kita terus dorong kepada pemerintah daerah antara lain terkait dengan masalah visum yang sekarang sudah ada dana DAK kita bisa ada dan ada yang bisa menjadikan solusinya, kemudian pemilihan sosial dan rehabilitasi. Kemudian yang lebih kita dorong adalah kepada pemerintah daerah adalah pembentukan UPTD. Nah pada saat ini kami laporkan dari terbentuk di 29 provinsi dan 124 kabupaten kota.
11. Kemudian peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak ini belum optimal juga. Nah masih banyak anak berhadapan dengan hukum, anak belum memiliki akte kelahiran, kemudian anak usia 5 sampai 17 tahun merokok dan pelajar terlibat dalam perkelahian. Nah ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi PR kita bersama.
12. Kemudian dampak Covid-19 pada kesejahteraan masyarakat. Nah ini kemiskinan, pengangguran, pemutusan hubungan kerja semakin memperberat daripada isu-isu strategis perempuan dan anak.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Nah rencana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 disusun sebagai berikut:



1. Yang pertama dari sasaran strategis itu adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia ramah perempuan dan layak anak.
2. Yang kedua adalah terwujudnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan target BB untuk reformasi birokrasi dan tentunya WTP untuk opini BPK. Kedua sasaran strategis tersebut diturunkan ke dalam ke dalam sejumlah indikator sebagaimana diuraikan pada laporan lengkap.

Yang berkaitan dengan sasaran program. Sasaran program tertentu adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatnya pemenuhan hak anak, meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO juga meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Kemudian berkaitan dengan kegiatan prioritas tahun 2022 dalam rangka melaksanakan lima arahan presiden itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat tadi yang pertama berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Dimana kegiatan antara lain yang kita lakukan tentu sesuai dengan Tusi kami di kementerian ini adalah dimana koordinasi dan advokasi isu perempuan pada program prioritas wirausahaan di beberapa kementerian/lembaga. Kemudian bimbingan teknis bagi Kementerian lembaga dan daerah dalam pemberdayaan ekonomi yang responsif gender.

Kemudian bimbingan teknis bagi sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi baik melalui PLUTdemikian juga melalui PNM dengan program Mekar dan lain-lainnya. Kemudian pelatihan kewirausahaan bagi perempuan seperti apa yang kami sudah laporkan pada RDP kemarin itu adalah kita akan fokus kepada perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, demikian juga kepada perempuan penyintas apakah dia penyintas bencana maupun penyintas kekerasan.

Kemudian berkaitan dengan peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak itu adalah koordinasi dan advokasi pada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan pembentukan forum kualitas keluarga serta pengembangan *database* keluarga sebagai input perencanaan kualitas keluarga di desa. Demikian juga bimbingan dan sosialisasi yang kami lakukan dengan kementerian/lembaga.

Kemudian berkaitan dengan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah penyusunan kebijakan dan NSPK tentang perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan dan TPPO. Demikian juga penyediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak serta manajemen penanganan kasus melalui SIMPONI PPPA dan sosialisasi dan KEE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO melalui berbagai media dan kegiatan-kegiatan pencegahan yang lainnya.

Kemudian berkaitan dengan penurunan pekerja antara lain adalah tentunya sesuai dengan Tusi kami lagi adalah sosialisasi dan KIE melalui berbagai media untuk mencegah pekerja anak, koordinasi pelaksanaan kebijakan penurunan pekerja anak lintas kementerian/lembaga dan penanganan pekerja anak di daerah wisata prioritas.

Dan yang terakhir lima isu prioritas yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak ini adalah penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 74 tentang Perkawinan. Kemudian advokasi pemerintah daerah untuk menandatangani komitmen pencegahan perkawinan anak dan ini sudah di beberapa daerah, sudah melakukan komitmen berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak ini. Kemudian juga sosialisasi dan KIE mencegah perkawinan anak diantaranya gerakan bersama pencegahan perkawinan anak yang kita namakan KEBER PPPA. Kemudian koordinasi pelaksanaan kebijakan penurunan perkawinan antara lintas kementerian lembaga dan daerah. Demikian juga penguatan peran forum anak dan Puspaga dalam pencegahan perkawinan anak.

Bapak Ibu Para Pimpinan demikian juga Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Pada kesempatan ini juga kami sampaikan beberapa kegiatan prioritas lainnya yang akan dilakukan tahun 2022 yaitu adalah pelembagaan pengarusutamaan gender di kementerian lembaga dan daerah melalui advokasi dan bimbingan teknis terkait PUG, kemudian penguatan kelembagaan daerah ramah perempuan dan layak anak dan desa ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian pelaksanaan KIE untuk mendukung penurunan *stunting* dan penurunan angka kematian ibu melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga profesi, dunia usaha, perguruan tinggi dan media dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, demikian juga upaya-upaya lainnya. Dan tentunya adalah perencanaan dan pemantauan dana alokasi khusus non-fisik meliputi pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang kita sudah gelontorkan di tahun 2021 nanti kami akan sampaikan. Kemudian juga dukungan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Pagu Indikatif tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya dirinci menurut satuan kerja dengan dan program sebagai berikut kalau berkaitan dengan program nah ini kami sampaikan dan ini masih kami untuk 2022, kami laporkan kepada pimpinan kita akan lebih bahas, lebih intens karena kami masih diberikan waktu sampai tanggal 11 Juni untuk kita lebih fokus sehingga anggaran-anggaran yang sedikit ini kita bisa fokuskan kepada lima AP. Kemudian fokus daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga terintegrasi lintas ke deputian. Dan kita harapkan capaian output nya lebih maksimal kepada masyarakat.

Nah ini untuk sementara, untuk 2022 tadi skemanya pasti tidak akan jauh berbeda cuman nanti kita fokuskan di deputian mana yang akan lebih banyak kita lakukan seperti apa yang kami sudah laporkan di RDP pada

minggu lalu, nah ini kita akan fokus kepada pemberdayaan perempuan dan di bidang kewirausahaan.

Kemudian kami sampaikan, laporkan berkaitan dengan usulan rincian pagu perubahan indikatif menurut program tahun 2022. Nah ini untuk program dukungan manajemen yang semula adalah 118 untuk operasionalnya adalah 118,87 miliar dan non operasional adalah 34,3 miliar sehingga total jumlahnya untuk program dukungan manajemen itu 153,2 miliar. Tapi untuk menjadinya kami sampaikan itu untuk operasional di tahun 2022 ini dukungan manajemen adalah sebesar 121,74 miliar dan non operasionalnya adalah 34,75 miliar. Sehingga menjadi dukungan program dukungan manajemen itu adalah meningkat 156,5 miliar. Sedangkan dari program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak yang semula adalah 99,43 miliar menjadi 96,19 miliar.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Pada saat pelaksanaan pertemuan ketiga pihak ya, *trilateral meeting* dengan Kemenkeu dan PPN Bappenas, kami telah mengajukan permintaan tambahan anggaran sekitar 24 miliar. Dimana tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan seleksi Komisioner Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027, kemudian *Residency G-20 Empower and Women 20* dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial di pedesaan kemudian pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan yaitu penyintas tadi apakah dia penyintas bencana maupun kekerasan dan pengembangan model ramah perempuan dan peduli anak yang fokus pada lima isu yang menjadi arahan bapak presiden.

Adapun rincian tambahan anggaran tahun 2022 yang kami usulkan, next mungkin itu bisa tergambar dalam kami sudah sampaikan di materi yang kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya dari tambahan 24 miliar di tahun 2022 berkaitan dengan fokus kegiatan ini kami mohon dukungan Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat terkait rancangan rencana kerja dan usulan tambahan anggaran 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Hal lain yang perlu kami jelaskan terkait dengan rencana kerja dan anggaran tahun 2022 adalah bahwa pemerintah telah menyetujui akan melanjutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik, perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2022. Nah untuk itu kami mengusulkan anggaran sebesar 128,2 miliar rupiah. Nah melalui forum multilateral *meeting* bersama Kementerian Keuangan kemudian dengan Bappenas dan Kemendagri, kami Kemen PPPA, beberapa hal lain yang disepakati adalah yang pertama dari segi arah kebijakan. Yaitu adalah peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk TPPPO di daerah. Kemudian penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan kekerasan termasuk TPPPO pada perempuan dan anak di daerah dan peningkatan cakupan dan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan termasuk TPPO di daerah dari segi dukungan terhadap prioritas

nasional dan RKP 2022 itu adalah secara langsung DAK non fisik mendukung prioritas nasional yang ke-3.

Yang kedua secara tidak langsung DAK PPA mendukung PN lain dan pencapaian *major project* dimana ibu hamil yang terlindungi dari kekerasan akan melahirkan anak yang sehat dan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah ini juga mendukung percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting* kemudian juga perempuannya terbebas dari kekerasan akan mampu lebih berperan dalam pembangunan ekonomi dan politik. Nah ini mendukung *major project* pengelolaan terpadu KUKM dan destinasi pariwisata prioritas dan pemulihan pasca bencana.

Kemudian dari segi kriteria teknis dan lokasi prioritas dapat Kami laporkan bahwa DAK non Fisik PPA diprioritaskan pada 34 provinsi. Seperti apa yang disampaikan Pimpinan Sidang tadi kita memfokuskan di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota untuk pelayanan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta dukungan manajemen DAK non fisik PPA dengan kriteria teknis itu adalah jumlah kasus atau korban kekerasan data Simfoni PPPA. Nah jumlah kasus ini yang kita jadikan dasar bagi daerah 30 provinsi dan 216 kabupaten yang mendapatkan DAK ini adalah jumlah kasus atau korbannya adalah tinggi berdasarkan data Simfoni PPA. Demikian juga capaian daripada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah berdasarkan evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya dan kabupaten/kota layak anak.

Kemudian yang ketiga, itu adalah kelembagaan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Adanya UPTD di daerah-daerah itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian yang keempat itu adalah kapasitas fiskal daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah untuk itu kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat dapat mengawal dan memperjuangkan DAK non Fisik PPA pada anggaran tahun 2022 tersebut demi kesejahteraan perempuan dan anak-anak Indonesia.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 beberapa hal adalah sebagai berikut dapat kami sampaikan. Yang pertama itu adalah telah ditetapkan bahwa pagu anggaran tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan anggaran sebesar 273,6 miliar rupiah. Nah pada tanggal 15 April 2020, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami penghematan itu sebesar 72,86 miliar. Sehingga pagu anggaran 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi 200,77 miliar.

Pada bulan November 2020, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan dana hibah itu adalah sebesar 2,7 Miliar untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di beberapa lembaga di daerah terpilih. Sehingga total anggaran yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020 itu adalah 203,48 miliar. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan *refocussing* kegiatan dan re-alokasi anggaran sebesar 3,6 Miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemudian yang ke-empat pada tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merealisasikan anggaran sebesar 199,48 miliar rupiah atau sebesar 98,03%. Dengan rincian realisasi yang bersumber dari rupiah murni itu sebesar 196,8 miliar atau 98,04%. Dan realisasi yang bersumber dari hibah sebesar 2 miliar atau 97,28%. Nah realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menduduki peringkat ke-13 ya kalau serapannya kami menduduki peringkat ke-13 dari 86 kementerian/lembaga.

Kemudian dapat kami laporkan juga di tahun 2020 ini dalam merealisasikan anggaran tersebut tentunya kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau oleh strategi pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan secara luring maupun daring untuk mencapai target kinerja dalam masa pandemic Covid-19 ini.

Selanjutnya rincian penyerapan anggaran tahun 2020, satuan kerja kami, kami paparkan pada tabel 15 tabel 5 tentang rincian penyerapan menurut satuan kerja tahun 2020. Mungkin kami tidak akan bacakan secara detail lagi karena laporan secara rinci, disamping dulu pernah kami paparkan kami juga sudah sampaikan melalui surat kami kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI Nomor B\_8 tertanggal 26 Januari 2021.

Pimpinan Sidang serta Hadirin yang berbahagia.

Nah untuk pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2021 kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini ditetapkan pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar 279,56 miliar. Nah pada tanggal 12 Januari 2021 pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan *refocusing* dan re-alokasi belanja tahun anggaran 2021 itu adalah sebesar 12,5 miliar rupiah sehingga pagu anggaran menjadi 267,06 miliar dan pada tanggal 18 Mei 2021 kembali mendapatkan kebijakan *refocusing* sebesar 2,15 miliar. Sehingga pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 menjadi 264,91 miliar rupiah.

Yang kedua, penghematan tersebut tentu bersumber dari rupiah murni dan jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan itu adalah belanja barang, belanja modal kemudian khususnya adalah belanja non operasional. Yang ketiga realisasi anggaran 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 sebesar 56,20 miliar atau sebesar 21,05%. Nah realisasi anggaran yang belum maksimal karena dalam triwulan pertama tahun ini kami Kementerian melakukan revisi Renja demikian juga RKA K/L sebagai konsekuensi dari revisi Renstra 2020-2024 yang membuat banyaknya perubahan output demikian juga klasifikasi rincian output RKA K/L ini sesuai dengan kebijakan daripada RSPP. Mudah-mudahan dan kami sudah komitmen dengan teman-teman dan saya sendiri tetap mengawal setiap tahun kita melaksanakan pemantauan berkaitan dengan serapan ini. Mudah-mudahan Juni ini kita bisa

dilanjut setelah revisi ini sudah ada sehingga teman-teman sudah mulai bisa bergerak melakukan kegiatan.

Pimpinan Sidang serta Hadirin sekalian yang kami hormati.

Terkait capaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mei 2021 dapat kami lakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Yang pertama berkaitan dengan isu arahan Bapak Presiden yang pertama peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Nah ini sudah terlaksananya koordinasi persiapan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan dengan lembaga masyarakat perempuan. Ini koordinasi intens sudah kami lakukan tinggal eksekusi pelaksanaannya. Demikian juga koordinasi dengan PNM. PT. PNM melalui program Mekarya untuk persiapan TOT bagi 800 manajer PNM untuk diteruskan kepada 36.000 pendamping.

Kemudian tersusunnya rencana aksi pengembangan Kewirausahaan Nasional bersama Kementerian KUKM untuk mensinergikan pelatihan kewirausahaan yang menysasar perempuan. Kemudian juga kurikulum kewirausahaan digital yang *intens* kita kerja samakan dengan Kominfo. Kemudian tersusunnya rencana kerja pelaksanaan model sekolah perempuan ini kita bekerja sama dengan Korea Selatan untuk di tahun 2021.

2. Dan ini selanjutnya berkaitan dengan isu arahan kedua itu adalah berkaitan dengan peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Nah berkaitan dengan arahan yang kedua ini langkah-langkah kegiatan yang sudah kita lakukan itu adalah :

1. Tersusunnya indeks kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak ini masih dalam proses.
2. Kemudian tersusunnya revisi Permen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Kemudian berkaitan dengan menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah sudah terlaksananya penguatan gugus tugas nasional dan daerah tentang pencegahan dan penanganan TPPPO ini dilakukan dengan mendorong pelaksanaan Perpres Nomor 22 Tahun 2021. Kemudian juga terlaksananya pendampingan kasus-kasus perempuan korban kekerasan pada proses penyidikan.
3. Kemudian yang ketiga terlaksananya pelatihan dan orientasi bagi para mitra kami yang ada di akar rumput.
4. Kemudian yang keempat itu adalah terlaksananya pengembangan model-model desa sesuai dengan prioritas daerah dengan pendekatan PATBM, apakah itu desa wisata ramah anak demikian juga desa bebas pornografi dan desa ramah anak bebas dari kekerasan di tiga desa ini sudah dilakukan. Kemudian kita sudah *me-launching* itu adalah tersedianya layanan Call Center sapa 129. Kemudian berkaitan dengan isu yang ke arah yang ke-4 itu adalah pencegahan pekerja anak. Nah disini terlaksananya pengembangan model desa wisata ramah anak dan bebas

eksploitasi anak. Yang kedua tersusunnya panduan sistem *monitoring* dan remediasi pekerja anak di perkebunan dengan pendekatan ke PATBM.

5. Kemudian arahan ke lima itu menurunkan atau pencegahan perkawinan anak ini Kita sudah melaksanakan MoU dan deklarasi bersama dengan antara Kementerian PPPA dengan MUI tentang pendewasaan perkawinan usia anak. Demikian juga, e-learning pengasuhan berbasis hak anak yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan standarisasi daripada yaitu Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Yang kedua terkait yang terkait dengan aturan perundang-undangan dan kebijakan nah ini sudah lahir baik itu Peraturan Presiden demikian juga Permen berkaitan dengan kebijakan tersebut.
3. Demikian juga yang ketiga berkaitan dengan kelembagaan pagi juga sudah kami sampaikan dan ini kami terus dorong berkaitan dengan apa yang menjadi tambahan Tusi implementatif di kementerian Ini adalah layanan rujukan akhir bagaimana kami menyiapkan adalah pembentukan dari UPTD. Nah ini kita dibantu, dikawal juga dari Kementerian Dalam Negeri. Dan penambahan-penambahan pembentukan UPTD ini terus dalam proses di daerah. Dan sampai saat ini kami sampaikan kembali ini baru terbentuk di 29 provinsi dan 124 kabupaten/kota.
4. Terkait dengan kerja sama dengan Kementerian lembaga demikian juga stakeholder. Tersusunnya nota kesepahaman Kemen PPA dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Majelis Ulama Indonesia dengan Yayasan Sayangi Tunas Anak, demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian juga beberapa perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra-mitra terdekat termasuk dengan para dunia usaha dan para pemerhati perempuan dan anak yang kita lakukan perjanjian kerjasama yang sudah kita wujudkan dengan beberapa rencana aksi.
5. Hasil capaian terkait dengan capaian penanganan Covid-19 tahun 2021.

Pada kesempatan ini kami laporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, kami sudah melaksanakan vaksinasi kepada para pendamping korban kekerasan baik anak maupun perempuan dan ini kami dibantu oleh Perpustakaan Nasional mulai lokasinya. Kemudian untuk sarana medis dan lain-lainnya kami dibantu dari Pertamina. Untuk lebih jelasnya secara rinci kami sudah lampirkan juga terkait dengan capaian kinerja itu tidak hanya eselon I. Demikian juga kami sudah lampirkan pada dengan eselon II berkaitan dengan apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh jajaran kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam kapasitas adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

Pimpinan sidang yang kami hormati demikian juga Bapak Ibu Komisi VIII yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan bersama ini pula juga kami sampaikan bahwa melalui Rapat Kerja Komisi VIII ini mohon kerja samanya yang selama ini kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di awal juga sudah disampaikan ke pimpinan sidang tidak henti-hentinya men-*support* kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu apresiasi dan terima kasih kami sampaikan setinggi-tingginya. Demikian,

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
*Om Shanti Shanti Shanti Om.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Menteri. Sebelum saya berikan kesempatan pada teman-teman, saya ingin *pointing* ya Bu ya? Ini kan kalau dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang laki-laki nih naik 5% yang perempuan ini naiknya cuma malah dalam tiga kecenderungannya turun ya nih? Dari 68 dan 3 tahun ya 68,6 menjadi 69,1. Tapi ini juga Bu ini anggaran tiap tahun turun dari 2020-2022. Walaupun kecil tapi kalau untuk presentasi Kemen PPA cukup tinggi dibandingkan dengan kementerian lain. Nah ini sebetulnya nanti harus jadi ada satu analisa itu karena harusnya kerja-kerja kita itu bisa solusinya kan ini indikatornya kan IPM ya. Nah ini sebetulnya apa gitu yang kita belum ketemu gitu dalam kerja-kerja kita di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sehingga kenaikan IPM perempuan belum belum *connect* kita belum sinergis dengan banyaknya kerja yang dilakukan oleh dulu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah ini silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau merespons, saya minta singkat ya singkat *to the point* karena kita juga waktunya sampai maksimal sampai pukul 12.00. Pak Yandri ingin menambahkan sedikit.

#### **F- PAN/ KETUA KOMISI (YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Sebelum ke anggota, terima kasih Bu Menteri yang pasti kami semua tidak menginginkan ada penurunan anggaran Bu. Dari awal kita bermitra maunya anggaran terbesar karena memang kebutuhannya banyak. Itu mungkin fokus kita nanti ketika membedah per eselon I dan pada para anggota nanti sudah diagendakan konsinyering dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tanggal 9 Juni di Wisma Kopo DPR. Pak Sestama, Pak diharapkan semua Eselon 1 hadir Bu Menteri karena kita akan benar-benar membedah anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan termasuk tadi DAK non Fisik yaitu 108 miliar Bu ya? Jadi kalau para anggota mau bertanya masalah anggaran ini baru pengantar Bu Menterinya nanti kita akan bahas. Tapi kalau ada Isu aktual yang mau dikonfirmasi segera tidak ada salahnya.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*



## **KETUA RAPAT:**

Sebelumnya saya sampai 12.00.

### **(RAPAT: SETUJU)**

Silakan Pak Husni, Pak Hasan, Pak Ali sama Pak Samsu Niang, Bu Ina sama Pak Rizal. Nyusul sama yang lain ya. Pak Jeffry sama Bu Lisda. Pak Husni. Silakan.

## **F- P. GERINDRA (H. HUSNI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Bu Pimpinan.

Yang saya hormati Ibu Pimpinan, Pak Ketua Komisi VIII, teman-teman Komisi VIII.

Yang saya hormati Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.

Memang ketua kalau kita berbicara tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cuma ada satu kesan saya Bu ketua bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak berdaya dalam meningkatkan anggaran. Mohon maaf Bu Menteri. Saya tadi sudah melihat disini tidak membahas tentang anggaran. Tadi di halaman dua sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RKP tahun 2022 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Ibu Menteri, diprediksikan peningkatan ekonomi kita di tahun 2022 5,3 sampai 5,8%. Kita masih belum lepas pada Covid-19 ini Bu Menteri. Dan juga disini saya melihat anggaran itu malah turun dan terpotong terus di 252,69 miliar. Sedangkan biaya belanja operasional itu ada 62,045.431. Ibu Menteri di masa Covid ini yang namanya belanja barang operasional itu tingkat kenaikan harga diprediksikan di 2022 itu 5-10%. Itu bisa lebih. Karena industri sekarang pembatasan, 3 M -5M itu semuanya menjadi mahal. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan. Ya? Naik itulah untung ada pengusaha di Komisi VIII.

Kemudian Ibu, ini satu lagi. Di halaman 8 dikatakan meningkatnya kekerasan berbasis gender secara online, perdagangan orang secara online, Komnas Ham Perempuan, ya terjadi kenaikan dari 241 kasus di 2019 naik di 940 kasus 2020. Ini naik lagi. Itu akibat dari pada aplikasi *WhatsApp*, *Facebook* dan *Mi-chat*. Jadi Bu Menteri banyak sekarang beredar di *WhatsApp*, *Facebook* itu foto-foto palsu mukanya macam si Husni. Taruh gambar macam bintang film.

## **F- PAN/ KETUA KOMISI (YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

Ini cerita pengalaman atau laporan Pak.

**F- P. GERINDRA (H. HUSNI, S.E., M.M.):**

Ini cerita orang Bu Menteri ya? Jadi, apanya? Kita orang partai kan harus pakai foto yang asli ya?

**KETUA RAPAT:**

Ini berbagi ilmu ya Pak ya?

**F- P. GERINDRA (H. HUSNI, S.E., M.M.):**

Jadi Bu Menteri untuk hal seperti ini, ini kalau dibiarkan ini akan meningkat. Saya mohon kepada Bu Menteri lakukanlah kerjasama dengan kementerian apa Kominfo ini ya Bu ya? Karena apa kalau barang palsu itu di apa namanya eliminasi ya?

**KETUA RAPAT:**

Sortir Pak.

**F- P. GERINDRA (H. HUSNI, S.E., M.M.):**

Sortir, ini kelihatannya apa ya sangat sederhana tapi dampaknya sangat luar biasa. Terima kasih, saya itu ada Bu Menteri. Yan terima kasih Bu Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT:**

Jadi hati-hati dengan foto ya. Oke Pak Hasan.

**F- P. GOLKAR (Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kepada Ibu Wakil Ketua serta Anggota Komisi VIII.

Yang kami Hormati Ibu Menteri para Eselon I.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan hari ini pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri Ibu saya pertama kali rapat dengan Ibu, baru masuk ke Komisi VIII ini tanggal 1 April kemarin. Saya Haji Hasan Basri Agus dari Golkar Dapil Jambi Provinsi Jambi.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi melihat capaian anggaran pada tahun 2021 pada posisi sekarang masih posisi 21,21% ya? Kalau kita lihat sampai bulan Juni sekarang. Kami tidak tahu persis biasanya nanti sampai jumpa banyak kecepatan. Mudah-mudahan capaian pada tahun 2020 yang lalu 28,03 persen capaian itu itu bisa tercapai malah bisa lebih. Sebab berkaitan dengan anggaran macet pertumbuhan ekonomi kita juga sangat tergantung kepada anggaran negara ini.

Kemudian yang kedua, kami melihat dari program yang ibu sampaikan, kalau kita lihat jumlah anggaran 252 miliar pada tahun 2022 yang akan datang itu kalau dibandingkan di tingkat provinsi itu hanya satu dinas. Saya sebenarnya kasihan juga, program banyak tapi anggarannya 232 miliar. Bayangkan yang diurus Indonesia ini. Ya tapi itulah kenyataannya ya Ibu juga harus menyesuaikan dengan program itu. Saran kami fokus saja jangan terlalu banyak program yang penting ada kaitannya yang secara besar ya langsung terhadap program Ibu. Sebab ya namanya pemberdayaan perempuan dan masalah anak ini persoalan yang sangat luas sekali di daerah-daerah.

Jadi oleh sebab itu sebelum sampai kepada pembicara mendetil kata Pak Ketua tadi pada saat nanti di puncak membahas anggaran, mungkin perlu dicek lagi yang jangan terlalu banyak, nanti tidak fokus dan tidak tercapai. Ya jadi kalau yang tidak penting itu tidak usah dulu lah. Cari yang kira-kira yang sangat penting saja untuk kepentingan instansi Ibu atau Lembaga yang Ibu Pimpin.

Kemudian yang selanjutnya, di daerah untuk Provinsi Jambi kalau kami informasikan itu terutama pengarusutamaan gender itu baru mencapai 12% dari 30% untuk perempuan. Dan ini sebenarnya perlu juga jadi kajian Ibu kedepan mungkin dari sisi kenapa mungkin sedikit ya? Kalau dulu mungkin dulu banyak, mungkin perlu pelatihan-pelatihan pada ibu-ibu anak-anak kita yang di kabupaten, provinsi berpotensi untuk bergerak di bidang politik ini. Nah kadang-kadang sisi lain masalah dana dan uang juga. Itu selanjutnya.

Kemudian yang kedua, untuk di Provinsi Jambi yang kedua. Itu masalah kekerasan dalam rumah tangga Kalau kami perhatikan kekerasan paling banyak persoalan ini masalah ekonomi dan itu menjad perhatian utama kita. Misalnya di Jambi itu 349 kasus, perempuan 315 kasus itu. Ada juga laki-laki jadi korban. Itu masalah rumah tangga ini baru ini tadi kami begitu masuk ke Komisi VIII ini itu melihat seorang ibu, itu hampir mati ditangan oleh suaminya karena suami tidak punya pekerjaan istrinya disuruh menjual tisu di persimpangan jalan. Pada hari itu tidak laku pulang hampir habis nyawaku sedih sekali mendengar sampai da mukanya nggak bisa melihat apa-apa dan kami sampai melihat di rumah sakit polisi pada saat itu. Dan keliatannya masalah ekonomi, tidak ada pekerjaan. Itu Cuma jual tisu di simpang jalan. Termasuk anak juga disuruh oleh suaminya.

Nah ini persoalan kita mungkin ada kaitannya dengan Covid mungkin. Karena ada diberhentikan dari pekerjaan mungkin suaminya. Dan hal-hal yang seperti ini perlu ditangani harus ada dana khusus untuk kita menangani setelah kasus itu dilatih mereka supaya nanti ada peningkatan kemampuan ekonomi. Itu persoalan yang kita lihat di lapangan yang banyak terjadi ini

sebenarnya kasus-kasus seperti itu di perkotaan. Kalau di desa insyaallah tidak terlalu banyak kekerasan rumah tangga di Jambi ini.

Kemudian, kami mendukung adanya UPTD di daerah-daerah. Tidak mungkin kalau ada petugas Ibu langsung di lapangan bisa fokus, kalau kita numpang di provinsi mereka ada kerjaan lain juga jadi banyak ada sambilan. Kemudian kami juga ingin tahu tentang pembentukan desa ramah perempuan itu apa gimana bentuknya tuh? Tempat main anak perempuan itu perempuannya harus sama dengan orang yang datang ke desa itu ataukah apa? Jadi kalau ada program seperti ini ada tanda tanya perlu kita evaluasi ke depan. Jadi itu saja hal yang disampaikan, selamat mudah-mudahan nanti sukses di tahun 2021.

*Wassalamualaikum warahmatullah.*

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Ali.

#### **F- P.G (MUHAMMAD ALI RIDHA):**

Terima kasih Pimpinan.

Ketua Komisi, Bu Menteri dan juga jajaran.

Ada dua hal yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Pertama tentang anggaran, kedua tentang capaian kerja 2021. Tapi khusus tentang anggaran tadi Pak Ketua sudah jelaskan terkait dengan 140 miliar DAK non Fisik bisa kita ketahui lebih jauh di Kopo. Kemudian terkait dengan peran lembaga/kementerian. Karena Pemerintah menargetkan ke depan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Ada banyak variable. salah satunya dua variabel yang terkait dengan posisi Bu Menteri tentang belanja pemerintah dan meningkatkan belanja rumah tangga. Nah disitu saya lihat tadi ada usulan peningkatan anggaran 40 Miliar untuk lebih banyak pada pemberdayaan ekonomi ya Bu? Nah ini saya rasa make sure, mudah-mudahan ini juga bisa dibantu sama teman-teman Komisi VIII. Tapi nanti yang lihat lebih detil di Kopo nanti Bu Menteri.

Nah ini yang kedua, ini terkait dengan isu-isu penting/krusial karena menyangkut capaian kinerja 2021. Khusus terkait Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, terkait dengan kesepakatan untuk memperpanjang nota kesepahaman lapan dan lembaga tentang percepatan kepemilikan akte kelahiran dan penajaman strategi. Jadi begini nanti Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak bisa dengan saya nanti hadir ke salah satu yayasan, panti asuhan. Saya datang ke beberapa panti asuhan, salah satu panti menyampaikan aspirasi tentang akte kelahiran anak. Kalau akte kelahiran anak, backup pemerintah sudah maksimal terhadap anak yang orang tuanya jelas, dan di luar panti. Kalau yang ada di panti ada tiga model. Satu, orang tuanya jelas karena nggak mampu dititipkan di panti, mudah dapat akte kelahiran. Kemudian satu lagi dititipkan di panti, kadang-kadang ibunya tidak

diketahui menghilang, sampai sekarang tidak ditemui kadang-kadang bapaknya yang hilang tidak jelas tetapi bisa ditelusuri sehingga akte kelahirannya memungkinkan dapat dibikinkan. Tapi kemarin ini ada satu hal sudah umur 10 tahun sampai sekarang tidak bisa dapat akte kelahiran. Sulit dia sekolah karena syarat sekolah itu menuju kelas SMP dari SD itu juga harus menunjukkan akte kelahiran.

Ada case ini, sekarang kan bisa catatan sipil belum bisa memecahkan masalah. Jadi kedua orang tuanya tidak diketahui. Sekarang sudah gede anaknya tidak punya akte sama sekali. Jadi harus ada terobosan dari Pemerintah, walaupun anaknya dicantumkan di KK salah satu pengurus yayasan tetap aja ndak mau dikeluarkan akte kelahirannya. Ini kan komitmen kemanusiaan kita terhadap anak-anak yang tidak minta untuk dilahirkan tanpa orang tua kan disitu sangat berdosa kita sebagai pemerintah tidak bisa mempermudah anak itu untuk menatap masa depan. Nah tolong Ibu Menteri nanti kalau bisa perlu nanti datang saya ada yayasan yang sama saya nanti ke lapangan. Nanti akan saya tunjukkan mudah-mudahan bisa dibantu itu mudah-mudahan bisa dapat akte kelahiran. Saya pikir itu. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Kita sebelah kiri dulu ya, Pak Jeffry. Bang Samsu Niang.

#### **F- PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi beserta Anggota Komisi VIII dan Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya.

Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Ibu Menteri memang sangat menyedihkan, anggaran 2020 pagu indikatif 2022 turun 222 miliar, sedangkan untuk 2021 kan tadinya 264 miliar begitu? Jadi turun. Ada penurunan untuk pagu indikatif 2022 ini. Ini baru pagu indikatif Bu Menteri, saya kira masih ada upaya tadi apa permintaan untuk tambahan anggarannya berapa 100 miliar lebih. Jadi masih ada upaya untuk melakukan komunikasi apakah melalui DPR dengan Banggar-nya disini Komisi VIII ini ada Banggar banyak disini.

Saya kira ini perlu ada komunikasi, ada penugasan dari Menteri siapa yang ditugaskan untuk melakukan komunikasi dalam rangka untuk melakukan peningkatan anggaran ini. Kalau ini anggaran ini sangat sedih sekali. Tahun lalu saja 264 miliar, sekarang sudah turun ini. Jadi hanya saya ingin sampaikan ini selama ini memang anggaran kementerian ini kan anggaran politik, ini anggaran budget politik. Memang perlu ada komunikasi politik, perlu ada komunikasi politik terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, terhadap DPR, masa tidak bisa. Ini harapan saya 2020 itu minimal lima sudah naik dua kali lipat dari anggaran sekarang ini. Harapan saya, karena

persoalan perempuan dan perlindungan anak ini dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Jadi harapan saya perlu ada komunikasi politik Ibu Menteri dalam rangka mensinergikan anggaran ini bisa naik. Karena setahu saya, saya di Komisi VIII di 2024 itu pernah mencapai 1 triliun lebih karena komunikasi politiknya lancar. Jadi bukan berarti apa namanya melakukan komunikasi ada hal-hal ini tentu enggak, ini demi kepentingan merah putih itu. Ini yang perlu diperkuat ada think tank nya untuk melakukan komunikasi politik. Sedih sekali kita ini apa yang bisa diharapkan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan ini sementara kasus-kasus semakin hari semakin meningkat.

Jadi saya cuma harapan Ibu Menteri apa namanya deputinya dan lain sebagainya itu harus harus kreasi dalam rangka untuk anggarannya. Meski ini baru pagu indikatif, masih ada harapan untuk, di Komisi VIII, Pak ketua Komisi, Ibu Ketua, saya kira bisa itu melakukan hal-hal yang ini kita DPR punya hak *budgeting*. Ya kalau Komisi VIII mau menggeser ke sini bisa itu, tapi selama ini ada komunikasi atau tidak dengan Banggar dengan Pimpinan Komisi, sebab kalau ini ada saya kira ini bisa, kepentingan ini. Saya kira itu saja.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ibu Ina Ammania.

#### **F-PDIP (INA AMMANIA):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Ibu Pimpinan beserta Anggota Dewan yang saya hormati.  
Juga Ibu Menteri beserta jajarannya.

Saya memang tidak membahas anggaran karena itu ada porsinya tanggal 9. Saya mohon juga tanggal 9, semua materi yang akan dibicarakan di Komisi VIII setidaknya sebelum tanggal 9 itu sudah kami terima Bu. Supaya nanti kita juga bisa membantu Ibu, bagaimana program-program ke depannya. Memang anggaran yang dimiliki oleh pemberdayaan perempuan ini adalah cukup minimalis Ibu. Tetapi saya berharap dalam perjalanannya itu bisa maksimum capaian tujuan Kementerian PP tentunya nanti bekerja sama dengan kementerian dan lembaga Bu.

Tadi Ibu sudah mengatakan program untuk ke depannya yaitu pelatihan kewirausahaan. Saya mohon di dalam kewirausahaan ini karena dikelompokkan dipilah pilah Bu paparan ibu yang halaman 8 masih kurangnya optimal peran ibu keluarga dalam pengasuhan anak, sehingga kalau

dihantam *kromo* bahasa Jawanya apabila disamaratakan itu akan menjadi dampaknya tidak baik Bu. Bagi yang masa produktif masih mempunyai anak yang umur 1 tahun 2 tahun 3 tahun sampai 5 tahun ini tentunya anak-anak itu perlu konsentrasi ibunya. Jadi kalau umpama dipakai untuk menambah ekonomi keluarga sehingga anaknya terbengkalai. Jadi oleh sebab itu tadi belum dinyatakan di dalam paparan Ibu, bagaimana dikelompokkan?

Saran saya dalam program juga Ibu melibatkan, apabila ada yang mempunyai anak-anak balita itu ada *kayak* penitipan anak *day care* yang mana juga bukan hanya kelompok bermain tetapi tidak pembelajaran akhlak yang mana notabene saat ini Bu anak-anak di sekolah dengan yang lebih tua itu tidak ada sopan santunnya sama sekali Bu. Oleh sebab itu tanggung jawab Ibu sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu dapat memprogramkan apa namanya hal-hal yang seperti ini.

Kedua Bu, saat ini SD-SD itu Bu sudah kecanduan *gadget*. Yang mana mungkin nanti ada penyuluhan untuk dapat bahwa yang memakai *gadget* ibu-ibunya itu diberikan penyuluhan Bu. Jadi enggak, malah kadang-kadang ibunya asyik pekerjaannya saya juga nggak paham Bu ya tiktok atau yang lain anaknya diberikan *gadget* supaya tidak mengganggu ibunya. Jadi oleh sebab itu tadi saya membaca program untuk dapat mendekati orang tua pendidik Ibu belum cantumkan.

Untuk penyintas kekerasan saya juga mendukung yuk ekonomi yang saat ini Covid-19 kita terbentur oleh perbaikan ekonomi. Nah disini ibu juga ada program kualitas keluarga di desa kualitas keluarga di desa. Jadi kalau umpanya ada forum kualitas keluarga di desa seyogyanya Ibu juga bekerjasama dengan kelembagaan yang lain tentunya juga dengan kepolisian Bu. Karena di kepolisian juga ada pemberdayaan perempuan dengan yang tadi juga Ibu mencantumkan program perkawinan anak.

Nah perkawinan anak ini terselubung Bu. Jadi di desa-desa yang sudah usia 13-15 itu tanpa tersirat *ter-declare* itu sudah diijon Bu. Ini nanti sudah akan dikawinkan kenapa kamu tidak belajar akan meneruskan ke SMP atau SMA nanti saya sudah akan dijodohkan di desa (suara tidak jelas). Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin pemberdayaan perempuan lebih teliti lagi jangan sampai nanti itu menjadi bom waktu Bu.

Nah, tadi saya ingin menyikapi paparan Ibu penyerapan anggaran menurut satuan kerja tahun 2021 memang disini baru 21,5% Bu realisasi anggaran. Mengingat tinggal 6 bulan lagi apa rencana kerja prioritas dan target yang diharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Bu. Saya minta nanti dijelaskan karena juga dana yang minimalis ini Bu prioritas Bu. Skala prioritas yang mana memang dapat tadi sudah disebutkan oleh rekan saya dari Jambi, skala prioritas supaya kelihatan kalau yang kecil, kecil, kecil, kecil, kecil tetapi kalau umpama difokuskan tiga program tetapi itu konsentrasi penuh dan sepenuh hati itu mungkin ada *goal*-nya yang bisa dirasakan masyarakat. Jadi nanti saya minta pada waktu pembahasan tanggal 9 skala prioritas itu juga di apa namanya dituangkan.

Pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 tadi saya sudah menyimak ya Bu ya? Saya nggak sebutkan lagi pagu anggaran tahun 2020 sebesar 273,6 miliar realisasi anggaran 2020 ini rata-rata sangat baik Bu karena saya nggak

ucapkan lagi di meja teman-teman sudah ada. Lami berharap bisa dipertahankan sehingga semakin baik untuk tahun berikutnya. Tentunya tahun berikutnya ini juga seperti tadi ucapkan tadi di meja teman-teman sudah ada. Kami berharap dipertahankan sehingga semakin baik untuk tahun berikutnya. Tentunya tahun berikutnya seperti tadi Bu ada penambahan. Tadi saya sudah melihat ada penambahan 24 miliar menurut saya sangat kecil cuman untuk pengembangan model desa ramah perempuan dan anak. Ini kan sebenarnya hal yang bisa dikaitkan paralel begitu dan juga pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial desa seleksi komisioner KPAI, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan.

Nah mungkin pelatihan kewirausahaan bagi perempuan ini dengan kertas jadi tidak bisa lepas itu dengan *daycare*. Jadi tidak bisa lepas itu dengan *daycare* jadi kalau mama ibunya dilatih anak-anaknya bagaimana Bu harus kita pikirkan apa namanya pengembangan itu. Oleh sebab itu tadi Ibu tadi menambah 24 miliar itu sangat kurang Bu kalau untuk Indonesia Bu. Tapi kalau Dapil saya saja Jatim 7 itu cukup ya. Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Siapa Pak Rizal ya? Pak Rizal, lalu sebentar ya Mas ya, nanti ke sini dulu ya baru ke Mas Paryono. Pak Rizal silakan.

#### **F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan.

Yang saya hormati Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Ibu Menteri.

Saya singkat saja Bu. Pertama kalau saya lihat program Ibu ini bagus-bagus semua. Jadi mulai dari bagaimana mencapainya ada indikatornya, kemudian ada target yang dicapai, kemudian strategi-strategi untuk melaksanakan kegiatan itu. Tapi memang sayangnya program ini kalau saya melihat seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak yang lain anggarannya terlalu kecil. Nah memang kalau kita lihat kalau saya mengusulkan Bu supaya program Ibu ini ada lebih terfokus. Kalau saya lihat ini lebih, lebih mengajak jadi 1,1,1,1. Jadi kemungkinan untuk mencapai target yang Ibu harapkan seperti yang disampaikan tadi itu sangat sulit.

Jadi misalnya di satu tempat yang misalnya terjadi banyak terjadi kekerasan di wilayah tertentu itu harus menjadi fokus. Jadi kita bisa mengetahui nanti di sana itu sudah tidak ada sudah tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan misalnya ataupun kekerasan terhadap anak. Jadi kita bisa mengukur tapi kalau hanya satu di wilayah ini satu di wilayah ini misalnya semacam pendidikan atau training itu sangat sulit untuk mencapai



apa yang Ibu harapkan misalnya mencapai target tadi. Itu yang pertama yang saya usulkan.

Kemudian yang kedua, setelah saya melihat realisasi anggaran di tahun 2021, itu terutama di poin 5 dan 6 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam perlindungan khusus anak itu prosentasi masih kecil. Baru 7%. 7% ini sementara anggarannya paling besar di antara deputi-deputi yang lain ini saya kira saya ingin tahu kira-kira apa kendalanya ya, mungkin apakah memang ada atau memang anggaran ini sudah berjalan tetapi laporannya belum masuk atau kah memang ini ada kendala-kendala tertentu sehingga masih posisi dalam 7%. Sementara ini sudah 6 bulan Bu, bulan Juni. Jadi memang saya kira ini termasuk anggaran yang paling besar di antara deputi yang ada.

Kemudian kira-kira apa kira-kira strategi Ibu untuk mencapai supaya anggaran ini lebih cepat. Jadi saya mengusulkan supaya tempat-tempat yang tertentu tadi supaya lakukan jangan disebar kepada misalnya di wilayah-wilayah yang memang tidak memerlukan. Memerlukan pembinaan memerlukan perlindungan dan lain sebagainya. Saya kira itu Bu sebagai tambahan Saya dari saya terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak Jeffry mohon dipercepat bicaranya. Pak Jeffry, Bu Lisda, Pak Paryono, Pak Dedi. Siapkan tadi kan belum angkat tangan Pak. Silakan Pak Jeffry.

#### **F-P GERINDRA (Dr. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Ibu Pimpinan dan juga teman-teman Anggota Komisi VIII dan juga Bu menteri beserta jajarannya.

Saya mungkin langsung saja ke *the point* ya. Pertama mungkin yang paling pertama adalah senada dengan teman-teman. Jadi kalau kata Pak Husni ini ini tidak berdaya menaikkan anggaran. Ini kan memang Pagu Indikatif di tahun 2022 ini turun kemudian juga yang 2021 juga itu ada mengalami perubahan juga tapi saya juga. Tapi saya lihat juga memang penyerapannya juga tidak bagus. Jadi ini sisa 6 bulan ini harus dipikirkan bagaimana caranya agar penyerapan itu bisa berjalan dengan baik.

Kemudian yang kedua selnya dipaparkan Ibu ini di program prioritas Kementerian PPPA ada di point tujuh ini menjelaskan tentang pembentukan Puspa Puan atau Pusat Pemberdayaan perempuan dengan konsep SIAP atau suara dan aksi perempuan pelopor. Nah ini mungkin mohon dijelaskan

lebih lanjut terkait konsep ini bagaimana dan juga penganggarannya bagaimana. Demikian mungkin terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F- P. NASDEM (Hj. LISDA, S.E., M.MTr.):**

Baik terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Ibu Bintang beserta seluruh jajarannya hadir.

*Alhamdulillah* di bawah kepemimpinan ibu yang segala program-program ide-ide terus dituangkan. Kalau saya melihat bahwa program-program yang tadi sudah Ibu paparkan ini luar biasa artinya tinggal bagaimana lagi kita dalam pelaksanaan pengawasan sehingga program-program tersebut bukan hanya seremonial tapi memang dapat berdampak baik kepada masyarakat Indonesia.

Namun dalam hal Bu karena memang anggaran sangat kecil dulu pernah kita sampaikan juga mungkin anggaran ini cocok 1 provinsi, untuk sebegitu besarnya kebutuhan kita terhadap perempuan dan juga anak. Namun kenyataannya untuk kita meningkatkan anggaran yang signifikan apalagi di kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini mungkin kita masih perlu waktu beberapa tahun ke depan sehingga memang kita harus dapat memanfaatkan dana yang ada dengan secara maksimal yaitu teman-teman bahwa kita harus fokus.

Kadang-kadang kita ini ingin merubah dunia tapi kita juga harus merubah Indonesia dulu. Kemudian kita merubah se-provinsi. Kita merubah se kabupaten dan ternyata kita harus merubah diri kita sendiri. Jadi maksud saya Bu alangkah lebih baiknya kalau apa-apa yang menjadi kendala masalah masalah selama ini saya melihatnya coba kita fokus kepada perempuan. Kadang kita berpikir teknologi lah yang lain-lain yang terlalu besar-besar tapi sebenarnya kita melupakan hal-hal kecil hal-hal dasar yang harus dimiliki seorang perempuan seorang ibu sebagai orang yang ada di hati sebagai adalah sebagai madrasah utama dan pertama yang ada di rumah.

Maksud saya begini kita juga tidak perlu malu untuk mengakui hal-hal kecil yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia khususnya seorang perempuan. Misalnya saja Bu senyum, mungkin kalau kita ajarkan pelatihan senyum dari KPPPA kayaknya itu suatu hal yang sepele. Mungkin dengan senyum itu dia dapat menghindarkan dirinya dari perlakuan kasar suaminya tetangganya dan dia pun dapat berbuat ramah kepada anak-anaknya kemudian belajar berkomunikasi yang baik. Dengan berkomunikasi yang baik juga akan menghindarkan diri dari percekocokan menyampaikan yang baik kepada suami. Kalau menolak seperti apa kalau meminta seperti apa, itu hal-hal yang kecil sangat berdampak besar. Begitu juga dengan komunikasi yang baik dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya dia dapat menyampaikan

apa yang harus disampaikan pada anak-anaknya yang boleh mana yang tidak boleh. Berperilaku yang baik dan lain-lain.

Sehingga menurut saya tidak ada salahnya kita sekarang ini kita pikir kita sudah belajar mau terbang ke bulan ternyata sekarang ini karena Covid kita diajarkan cara mencuci tangan tidak perlu kita mau kita aku kita balik. Saya sampaikan ini Ibu karena saya melihat bahwa mohon maaf di lapangan itu untuk membuat perempuan senyum saja susah. Nah jadi kita kembali lagi ke sana dengan hal yang besar yang bisa kita berikan kepada seorang perempuan Indonesia. Ini akan berdampak baik untuk lingkungannya karena perempuan yang cerdas, kuat dia bukan hanya dapat melindungi dirinya sendiri tapi dia juga dapat melindungi lingkungannya khususnya keluarga dan anak-anak tercinta. Demikian terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Mas Paryono, saya perpanjang dulu sampai jam 12 ini kita izin mungkin jika ada agenda mau pengumuman haji Bersama Menteri Agama keputusan haji itu pukul 1. Jadi maksimum sekali 12.30 saya harus segera ke sana. Mas Paryono terakhir ya. Pak Didi nggak ada lagi ya?

#### **F-PDIP (PARYONO, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bu Menteri yang saya hormati beserta jajarannya, segenap Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Jadi tadi apa yang sudah kita dengarkan bersama yang disiapkan oleh Bu Menteri. Yang saya garisbawahi yang pertama adalah soal anggaran. Bukan secara kekal, jumlah anggarannya yang relatif sangat-sangat kecil. Kedua, dengan nomenklatur dan tupoksi Ibu Menteri sebagai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan padahal di republik ini kalau pemberdayaan perempuan dengan anggaran yang relatif kecil, bagaimana kita bisa memberdayakan ratusan juta perempuan Indonesia? Bagaimana kita bisa melindungi puluhan juta anak-anak Indonesia?

Kalau kita cermati, ini pemerintah ya mohon maaf, yang kurang serius dilihat dari sisi anggaran. Lha iya kementerian-kementerian lain ratusan triliun, puluhan triliun, padahal ini adalah sangat strategis untuk memberdayakan para perempuan Indonesia yang selalu didengung-dengungkan. Peningkatan perempuan kesetaraan gender, melindungi anak-anak Indonesia. Seharusnya ini tidak jauh dari anggaran pendidikan ini harus ada konsep-konsep yang riil? Konsep apa untuk memberdayakan perempuan Indonesia ini, konsep apa untuk melindungi anak-anak Indonesia ini yang riil? Dengan hanya anggaran yang kecil kalau saya lihat hanya ada seremonial-

seremonial. Lha ini mohon menjadi perhatian Ibu Menteri. Ini riil kok, kita memperdayakan perempuan Indonesia yang berkualitas bla bla dan sebagainya. Ini anggaran sekecil ini mana mungkin? Jangan hanya kementerian ini hanya menjadi simbol saja bahwa negara ini sudah memperhatikan perempuan. Tapi kalau melihat anggarannya? Oh, sama sekali nggak terlihat perhatiannya negara ini kepada perempuan, sama sekali tidak terlihat perlindungannya kepada anak-anak. Yang mana kejadian riil di bawah tidak hanya sekedar memberdayakan perempuan tidak hanya sekedar melindungi tetapi juga harus mengawasi Bu.

Banyak kejadian-kejadian di bawah, kasus KDRT, kekerasan terhadap anak masuk ke ranah hukum. Tetapi *ending*-nya apa? Selesai di bawah meja, karena apa? Yang melakukan penganiayaan kekerasan ini orang yang kuat di daerahnya. Sehingga orang-orang yang lemah ini tidak ada yang mengawasi dalam perlindungannya. Maka saya kasih masukan kepada Bu Menteri, pengawasan ini juga penting. Jadi kementerian Ibu ini bisa mengerjakan kerja sama dengan kementerian-kementerian yang ada walaupun toh anggarannya ini Pemerintah kurang memperhatikan untuk menaikkan. Anggaran satu dua triliun nggak ada artinya buat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Nggak ada artinya, apalagi cuma 270 miliar. Ini hanya seperenam, seperlimanya APBD kabupaten yang penduduknya cuma 500-700 ribu. Ini ratusan juta hanya 200 sekian miliar. Ini bentuk kurang seriusnya Pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan calon anak-anak bangsa, calon penyangga masa depan republik ini bagaimana ke depan republik ini lebih baik kalau anak-anaknya tidak di-*manage* lebih baik, bagaimana peran perempuan Indonesia punya peran yang strategis kalau pemberdayaannya saja tidak diberdayakan secara maksimal. Ini sebagai masukan saja bagi bu Menteri.

Dan mohon maaf saya juga baru di Komisi VIII saya dari Fraksi PDIP Perjuangan dari baru pertama kali bertemu dengan Bu Menteri. Ini sebagai masukan saja bagi orang lainnya mohon maaf.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya Bu Menteri, ini kalau kita kembali lihat angka ini, IPM itu kan kelihatan sekali angkanya ketika Covid ini perempuan dalam kondisi yang tidak lebih baik. Kalau dilihat angka IPM-nya, dan dari angka itu mungkin banyak catatan kasus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan. Banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kalau kita buka satu-satu menyedihkan dibalik angka itu. Nah ini *concern* teman-teman, baik menyangkut anggaran menyangkut berbagai macam kasus yang kadang memang di daerah kita hadapi secara langsung. Nah kita mohon Bu Menteri untuk sebelum kita ambil kesimpulan Bu Menteri memberi memberikan jawaban singkat. Terima kasih.

## **MENTERI KPPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Terima kasih Ibu Pimpinan. Karena waktu terbatas apakah boleh kau jawab secara general saja? Tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih Pak Yandri, Pak Husni kepada Pak Hasan Basri. Demikian juga Pak Kelakan, Pak Samsu Niang, kemudian juga Bu Ina Ammania, kemudian Pak Rizal, Pak Jeffry, Bu Lisda dan Pak Paryono. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang pada intinya memberikan *support* kepada kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berkaitan baik itu dengan anggaran demikian juga program-program kerja kita ke depan.

Nah pada intinya apa yang disampaikan oleh Bapak itu benar satu kita harus fokus nah itupun sudah kami berdiskusi dengan teman-teman kami di jajaran kementerian ini bagaimana kita fokus program ke kementerian ini adalah berkaitan dengan Presiden, kemudian juga fokus ketika sudah keluar Perpres Nomor 2020 tentang Layanan Rujukan Akhir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kalau tadi Bapak/Ibu menyampaikan itu program terlalu banyak yang ingin saya sampaikan itu terlalu luas. Itu adalah berkaitan dengan Tusi kami di kementerian ini adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan berkaitan dengan perempuan dan anak. Tadi memang benar kalau kita bicara perempuan, perempuan ini mengisi setengah dari populasi Indonesia hampir 49,4% itu adalah perempuan dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia yaitu 31% ini memang PR yang sangat berat. Tapi ketika kami melihat Tusi yaitulah keterbatasan yang ada di kami hanya kewenangan kami adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan langkah-langkah dalam hal pemberdayaan dan perlindungan anak kami lakukan dengan melakukan advokasi dengan Kementerian lembaga pemerintah daerah.

Yang ketiga, kita bicara masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak inilah komitmen yang kita harapkan kepada kementerian lembaga terkait demikian juga dengan kebijakan-kebijakan pimpinan daerah untuk dalam hal pemberdayaan perempuan demikian juga melindungi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia melalui kebijakan-kebijakan pimpinan daerah apakah gubernur bupati maupun walikota. Itu yang membuat apa yang saya paparkan tadi cukup banyak yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.

Tapi secara gambaran umum saya sampaikan terima kasih ini sudah memang kita fokus. Saya sangat setuju Pak, bahwa ketika kita bicara daripada lima arahan Bapak presiden dalam dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hulunya adalah faktor ekonomi. Kalau ekonomi tidak kuat ketika kita bicara pengasuhan, bicara kekerasan, kemudian bicara pekerja anak, kawin anak ini adalah hulunya ekonomi. Kami sangat paham Pak, itulah yang ke depan kita lakukan dan kami bicarakan tambahan anggaran yang kami lakukan salah satunya itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Tapi karena ini sudah banyak dilakukan oleh kementerian lembaga salah satu indikator yang spesifik di kementerian ini yang kami eksekusi agar itu bisa kita lakukan secara teknis adalah sasarannya perempuan kepala keluarga dan perempuan penyintas, apakah dia penyintas bencana atau dia penyintas kekerasan.

Kemudian terima kasih juga untuk daripada pembentukan UPTD. Kemudian juga Pak Ali tadi menyampaikan itu kita koordinasi dengan yayasan nanti kami akan komunikasikan. Berkaitan dengan anggaran seperti Bapak Ibu itu juga sampaikan secara gambaran umum. Sebenarnya kalau kami melihat ini adalah kondisi yang sangat sulit untuk kita semua di masa pandemic ini. Ketika kita berjuang untuk tambahan anggaran ini terjadi di semua kementerian/ lembaga pemangkasan daripada anggaran dan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan demikian juga teman-teman Komisi VIII yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami.

Kalau kita bicara masalah tambahan anggaran sebenarnya pergerakan tambahan anggaran ini kalau boleh jujur sudah ada di kami di kementerian ini di mana di tahun 2021 ini seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan juga kita sudah mendapatkan tambahan berkaitan dengan DAK yang salah satunya akan bisa *men-support* kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal pendampingan kekerasan terhadap korban di daerah lalu penggelontoran dana DAK di 34 provinsi demikian juga 216 kabupaten/kota. Makanya dalam Rapat Kerja kami mohon *support* daripada Komisi VIII untuk bisa tetap membawa kami bagaimana DAK yang sudah kita lakukan di 2021 ini bisa kita pertahankan di 2020 karena itu sangat dibutuhkan. Karena selama ini berkaitan dengan korban kekerasan yang menjadi kendala di bawah selain penguatan SDM para pendamping, kemudian daripada itu UPTD, pembentukan UPTD itu adalah pendampingan daripada korban dan korban itu sendiri yang selama ini karena visum itu untuk mendapatkan biasanya ditanggung oleh korban mungkin melalui DAK ini bisa membantu daripada korban berkaitan dengan dana yang dibutuhkan.

Kemudian tadi juga disampaikan/dipertanyakan oleh Pak Rizal secara gambaran umum Bu Ina Pak Rizal kemudian juga menyampaikan tetap fokus yaitu berkaitan dengan dua deputi ini Pak. Itu ada kenapa deputi ini serapannya sangat kecil sekali, deputi THP kemudian juga PKA karena di dua kedeputian ini di tahun 2021 ini ada survey. Survey yang menyedot anggaran cukup besar. Dari dua survey ini terkait dengan survey dengan pengalaman hidup perempuan nasional itu ada anggaran 13,6 miliar yang akan dikerjasamakan dengan BPS. Sebenarnya ini sudah dalam proses. Demikian juga survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja ini penganggarnya hampir 16 miliar. Itulah yang menyedot anggaran kenapa serapannya kecil sebenarnya tapi prosesnya itu sudah dilakukan di awal Maret.

Mudah-mudahan apa yang disangsikan oleh Bapak Ibu sekalian di sudah masuk di bulan Juli ini serapan masih 21%. Dan ini saya akan tetap kawal mudah-mudahan penyerapan anggaran di tahun 2021 tidak jauh berbeda dari 2020 98,3% ini bisa tetap kita pertahankan kita tingkatkan lagi dan saya setiap bulan itu terus mengawal Bapak/Ibu berkaitan dengan serapan ini selain sejauh mana capaian tidak hanya serapan saja bagaimana outputnya. Yang jelas terkait dengan serapan anggaran tersebut ditetapkan kawal. Tapi tentunya perlu tetap mohon arahan masukan dari Bapak Ibu semuanya yang intinya berkaitan nanti tanggal 9. Apa yang disampaikan oleh ibu Ina juga mudah-mudahan sebelum tanggal 9 kita sudah berikan berkaitan

dengan program-program ke depan yang akan kamu lakukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

Kemudian juga dengan yang lainnya secara umum yang tadi disampaikan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih support dan dukungan dari pada Bapak Ibu semuanya. Apa yang tadi sudah kita diskusikan nanti kita akan perkuat di tanggal 9 untuk mendukung bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia ini bisa berdaya, kemudian juga anak-anak terlindungi. Nah berkaitan dengan PR-PR yang lainnya yang itu kami bisa fokus melakukan kegiatan nanti kami akan sampaikan di tanggal 9 terutama berkaitan dengan penambahan anggaran sebesar 24 miliar tersebut. Dan ini mudah-mudahan menjadi catatan Pak Sesmen, para deputi semuanya untuk mempersiapkan materi-materi sehubungan persiapan kita akan melakukan konsinyering pada tanggal 9 dengan Komisi VIII untuk penyempurnaan. Demikian juga program-program yang kita lakukan.

Kemudian Bu Lida terima kasih banyak ketika kita bicara masalah perempuan itu tidak perlu program yang muluk-muluk, sebenarnya itu benar Bu. Tapi dengan hal yang sederhana saja tadi menyatakan dengan senyum itu membawa dampak yang besar. Nah kami juga sering juga menyampaikan ketika berkaitan dengan pengasuhan anak ini yang tidak terlepas seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ina sekarang ini menjadi PR kita bersama anak-anak sudah, setiap kegiatan baik orang tua maupun anak ini *chemistry* ibu dan anak ini sudah mulai kita lihat adalah renggang karena disibukkan dengan gadget dan sebagainya.

Kemudian juga kami sudah menyampaikan juga berkaitan dengan Deputi yang membidangi kualitas keluarga ini bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas untuk kita semua pahami ibu ada ibu itu adalah pendidik pertama dan utama. Makanya kedepan dari hal-hal yang sederhana itu sering kita sampaikan melalui Puspaga. Kami punya yang namanya pusat pembelajaran keluarga hampir di 124 ya Puspaga yang ada di seluruh Indonesia ini dilengkapi dengan sekolah tentunya disupport oleh pimpinan daerah. Inilah yang akan membentuk karakter anak-anak kita ke depan. Makanya, kami sering sampaikan kepada teman-teman daerah Untuk memanfaatkan Puspaga ini. Itu sebenarnya dalam hal pendidikan anak itu sangat sederhana dan kita sudah sering disampaikan seperti apa yang Bu Lida sampaikan mulai dari yang sederhana dengan senyum dan dalam pendidikan anak pun kita sampaikan kepada orang tua melalui Puspaga itu cukup dengan cium dan usap. Itu akan akan menimbulkan kerekatan *chemistry* antara ibu dan anak ke depan ini. Tapi realitas sekarang ini memang PR kita bersama dengan teknologi yang betul-betul menghantam kita itu tidak terlepas juga yang menyebabkan tingginya kekerasan yang terjadi.

Kalau berkaitan kerjasama dengan Kominfo sudah kami lakukan mulai 2020 itu kita sudah lakukan kerjasama dengan Kominfo karena berkaitan dengan meningkatnya kekerasan apalagi kekerasan berbasis online ini tidak terlepas dari pada situs-situs yang memang intervensinya itu ada di Kominfo. Dan kami juga kerja sama dengan Tim Siber yang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian kadang-kadang banyak yang kasus yang sudah 2016 itu diperkirakan kembali seperti itu hoaks yang betul-betul menghantam

dan memberikan suasana yang luar biasa mencekamnya terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah hal ini sudah kami lakukan juga dengan Kementerian Informatika demikian juga dari Siber dengan pihak kepolisian.

Mungkin secara gambaran umum itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Ibu Pimpinan, Bapak/Ibu Komisi VIII terima kasih masukannya pada hari ini dan tentunya menjadi catatan bagi teman-teman kami di jajaran Kemen PPPA walaupun Tusi kita adalah koordinasi-sinkronisasi kebijakan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita eksekusi dengan hasil nyata dari Kemen PPPA ini juga menjadi catatan kami untuk kami fokus. Mudah-mudahan juga menjadi catatan bagi teman-teman semuanya.

Terima kasih Ibu Pimpinan. Terima kasih Bapak/Ibu Komisi VIII, kami tunggu kerja-kerja dan kerja samanya dan mudah-mudahan untuk tambahan anggaran yang baru rencanakan itu adalah tambahan anggaran di 2022 sebesar 24 miliar kalau ini sudah didukung respon dari teman-teman Komisi VIII luar biasa. Kami akan coba gali lagi tentunya berdasarkan data agar intervensi yang kami lakukan dalam pemberdayaan perempuan ini dengan *output* yang jelas dengan *outcome* yang jelas itu dapat kami wujudkan. Tentunya n berdasarkan fakta fakta atau data data seperti apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu dari Komisi VIII.

Demikian Ibu Pimpinan yang dapat saya sampaikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Menteri atas penjelasannya. Sekarang kita menuju pada:

Draf Kesimpulan  
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI  
dengan  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Masa Sidang V Tahun 2020-2021  
Kamis , 3 Juni 2021

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2022. Evaluasi APBN tahun 2020 dan kinerja pelaksanaan APBN Tahun 2021 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2022 sebesar Rp.252.693.956.000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp26.869.982.000 atau sebesar 9,61% dibandingkan dengan pada pagu awal tahun 2021 sebesar Rp.279.568.938.000. Pembicaraan lebih lanjut Pagu Indikatif Kementerian Pemberdayaan



- Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dan perubahannya akan dibahas dengan Eselon 1 pada tanggal 9 Juni 2022.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2022 sebesar 24 miliar dan usulan Dana Alokasi Khusus atau DAK non Fisik perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp128.184.324.000.
  3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 sebesar Rp199.480.957.000 atau 98,03% dari pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp203.187.939.000.
  4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai serapan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021 sampai dengan 2 Juni 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp56.207.703.000 atau 21, 21% dari anggaran sebesar Rp264.909.120.000. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindak lanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
    - a. Mengoptimalkan program advokasi pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak terkait masih rendahnya kesetaraan gender dan banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak di daerah sehingga perlu mempercepat pembentukan UPTD di daerah.
    - b. Meningkatkan dan memperluas program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan atau ibu rumah tangga guna membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Demikian kesimpulannya Bu Menteri, apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada hal yang dianggap perlu direvisi? Jadi poin besarnya kita memahami pemaparan anggaran ini beserta penambahannya dan ada beberapa poin ya yang masih kita perhatikan yaitu rendahnya penyerapan anggaran kementerian sampai di bulan Mei ini. Tentu ini menjadi koncern kita juga akan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan beberapa tadi isu aktual yang disampaikan teman-teman Komisi VIII terutama menyangkut kekerasan, pemberdayaan dan juga perlindungan anak yang kita harapkan tentu Bu Menteri tetap bekerja *full speed* dan *full team* Bu dalam persoalan-persoalan ini apa yang Perlu diperbaiki lagi atau sudah cukup sudah cukup ya? Teman-teman Komisi VIII Bang Samsu? Oke kalau begitu demikian.

**MENTERI KPPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Ibu Pimpinan, di poin yang kelima terkait meningkatkan dan memperluas program pelatihan kewirausahaan. Seperti di awal sudah kami sampaikan bahwa kita akan fokus kepada perempuan penyintas Bu.

**KETUA RAPAT:**

Oh iya perempuan penyintas, kewirausahaan, bencana bagi perempuan penyintas ya?

**MENTERI KPPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Fokus pada perempuan penyintas baik itu dalam bencana maupun kekerasan demikian juga perempuan kepala keluarga.

**KETUA RAPAT:**

Dilengkapi saja mungkin biar sama ya kalimatnya. Baik itu perempuan penyintas, baik itu dalam daerah bencana.

**MENTERI KPPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Penyintas bencana maupun penyintas kekerasan,

**KETUA RAPAT:**

Oh penyintas bencana maupun penyintas kekerasan ya?

**MENTERI KPPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Dan perempuan kepala keluarga.

**KETUA RAPAT:**

Baik itu bencana dan kekerasan serta perempuan kepala keluarga dan ibu rumah tangga atau perlu atau tidak.

**MENTERI KPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):**

Kalau ibu rumah tangga ini terutama fokus pada ibu rumah tangga miskin. Ini juga menjadi fokus kami tapi kami sudah kerja sama dengan PT. PNM pendampingannya. Itu hampir 7,5 sekarang perempuan pra sejahtera sudah diberdayakan ibu rumah tangganya.

**KETUA RAPAT:**

Tapi dalam kaitan B ini adalah pelatihan kewirausahaan nya yaitu rumah tangga nya tidak di sini tolong *delete* Pak. Guna membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Demikian hasil kesimpulan rapat kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi jalan baik bagi perbaikan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia dan anak dan ini merupakan kerja kita semua dan terima kasih juga kepada Ibu Menteri PPPA beserta jajaran, teman-teman Komisi VIII yang perhatian dan semangatnya dalam kita membangun kebijakan-kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan kita bahas dan kita jabarkan selanjutnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII pada tanggal 9 dengan para Eselon 1.

Saya tutup dengan *wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Semoga ini menjadi Jalan baik bagi niatan dan kerja keras kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)**

**Jakarta, 3 Juni 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**